
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 2 NO 2
JULI 2016

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

ETIKA SECARA ISLAM SEBAGAI BENCHMARK DALAM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK SYARIAH

Nia Tresniati – Dosen Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (nia150874@gmail.com)

ABSTRACT

Based on some researches, there's still unfair business practice and ethical problem in our society. In financial and banking industry, shariah bank has infraction ethical related to the product of financing particularly on forbidden contractual. The methodology of study is literature study, Interpretation of Al-Qur'an verses, and analyzing the research. The study is focused to the islamic ethic as benchmarking for corporate governance in shariah bank. In islamic lesson, the individual has ethical beliefs as a moral compass (command and prohibition from God) that helps guide a person for hereafter. Allah SWT has determined the effectively supervision mechanism with reward and punishment. Islamic principles then acts as early warning that can control their behavior. Therefore, each person in one organization has good internal control for their own ethics that can build integrity. If all people in organization have placed the ethical forward for their activities as guidance, it creates corporate culture with high integrity and trusteeship. Good ethic drives the organization to good corporate governance in shariah bank with the high quality performance based on prudential principles, its purpose to Allah SWT and society. Value proportions from bank shariah supposed to create the economic justice for universal human trait.

Key Words : *Ethics, Business Ethics, Islamic Principles, Benchmarking, Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jika berbicara praktik bisnis yang terjadi dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya praktik bisnis yang kurang *fair*. Sehingga dibutuhkan suatu batasan dalam praktik bisnis berkaitan dengan suatu perbuatan yang mana yang boleh atau tidak dilakukan. Batasan-batasan tersebut dapat diaplikasikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari suatu etika, sehingga dapat dijadikan suatu pedoman pengembangan kinerja suatu perusahaan dalam praktik bisnisnya. Dengan memiliki ukuran pedoman yang jelas, dapat diukur apakah suatu perusahaan melakukan penyimpangan atau tidak dari pedoman yang telah ditentukan. Pedoman tersebut dapat dijadikan suatu instrumen dalam mengukur prestasi perusahaan.

Berkaitan dengan organisasi dari perusahaan, kejelasan pedoman tersebut dapat menumbuhkan budaya kerja yang tinggi dengan persaingan yang sehat atau fair dalam organisasi perusahaan. Sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang baik secara material maupun spiritual. Terdapat pemikiran lain yang menyatakan bahwa etika dalam suatu perusahaan dapat menghambat proses percepatan usaha, karena dengan etika akan menciptakan suatu proses birokrasi yang lama (stagnan). Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tantangan bagi perusahaan. Khususnya berkaitan dengan peran manajemen untuk dapat menjadikan suatu etika sebagai pedoman atau proses patokan (*benchmarking*) yang diikuti dengan perbaikan yang berkesinambungan (*Continuous Improvement*) dengan dilandasi prinsip spiritual. Dengan demikian dapat membuat perubahan pemikiran khususnya bagi pihak yang menganggap etika sebagai hambatan dalam usahanya.

Suatu organisasi perusahaan yang beretika dapat memiliki beberapa keuntungan baik dalam secara internal maupun eksternal. Dalam internal perusahaan, akan tercipta kondisi budaya kerja dan persaingan yang berdasarkan pada prinsip *fairness*, karena semua elemen dalam organisasi perusahaan akan memiliki batasan-batasan yang jelas baik dari sisi aturan maupun budaya kerja (tidak menimbulkan ketidakpastian). Bagi pihak eksternal, jika perusahaan memiliki reputasi (*brand image*) yang baik, dapat menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat (konsumen, mitra bisnis, pemerintah, dan pihak lainnya). Keseluruhan keuntungan tersebut dapat menciptakan produktivitas yang tinggi dan efisiensi yang dapat meningkatkan tingkat kinerja dan nilai dari suatu perusahaan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, budaya korporasi sebuah bank dengan prinsip islam (syariah) diharapkan dapat mencerminkan nilai islam dalam semua kegiatan usahanya baik yang berkaitan dengan praktik bisnis maupun pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, dalam perkembangan usaha bank syariah dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang disyariatkan dalam islam khususnya berkaitan erat dengan prinsip *Amanah* (kepercayaan), dengan tujuan tercapainya keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Lebih jauh, diharapkan masyarakat khususnya muslim dapat memberikan dukungan bagi lembaga keuangan syariah sehingga dapat menjadi bagian integral dari sistem ekonomi islam dan dapat diaplikasikan untuk seluruh masyarakat luas (*universal*) dan seluruh masa.

LANDASAN TEORI

Etika

Pengertian Etika berdasarkan literatur adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral dan akhlak yang dianut oleh masyarakat luas atau ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (anutan) masyarakat (Badudu dan Zain, 1996). Secara konseptual, etika merupakan suatu konsep dari akhlak terhadap perilaku benar dan salah, yang menegaskan tindakan mana yang bermoral dan tidak bermoral (Lawrence dan Weber, 2011).

Faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan baik dan salah dapat berdasarkan pada beberapa sumber. Agama merupakan sumber utama dalam menilai benar dan salah, selain aturan lainnya. Dalam agama islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk menilai perilaku yang berkaitan dengan etika, sebagaimana firman Allah, "*Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-*

orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizin-Nya dan menuntun mereka ke jalan yang lurus” (Al-Maidah (5)15-16).

Untuk mengarahkan pengaplikasian etika pada perilaku (perilaku perseorangan atau perilaku organisasi), diperlukan prinsip-prinsip yang mendasari etika. Prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan etika secara umum dalam Al-Qur'an termuat dalam ayat-ayat yang mengungkapkan tentang kebenaran, kejujuran, kebajikan, tanggung jawab (amanah), keadilan, kebatilan, kezaliman dan kerusakan. Menurut Lawrence dan Weber, 2011, prinsip-prinsip dasar etika tersebut antara lain kejujuran (*honesty*), menepati janji (*keeping promises*), Tolong menolong (*helping others*) dan menghargai hak-hak orang lain. Prinsip-prinsip yang mendasari etika tersebut yang dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan yang tidak hanya didasari oleh pedoman secara umum tetapi juga secara spiritual.

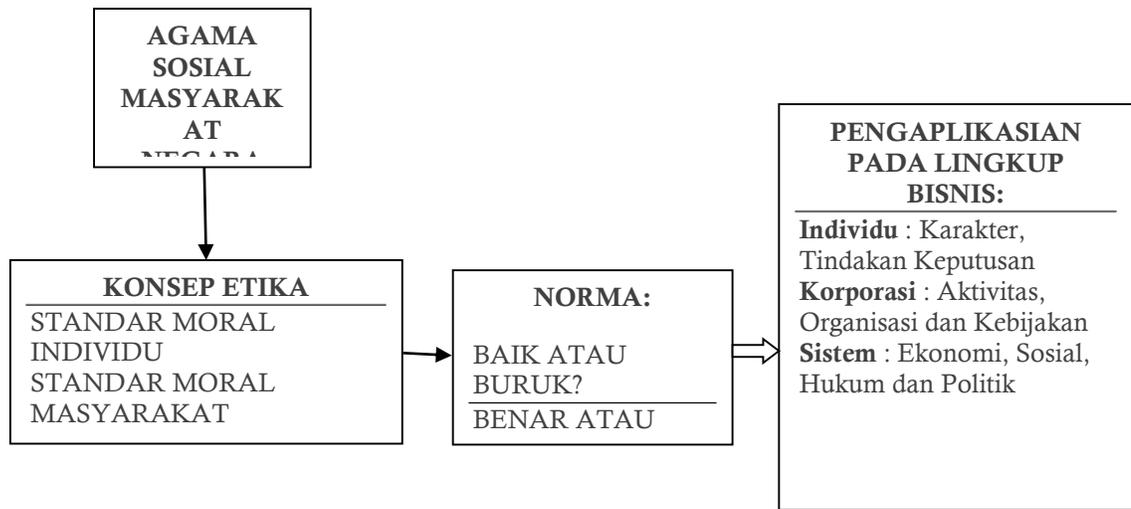
Etika Dalam Bisnis

Menurut Afiff, 2003 bisnis merupakan kumpulan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi bisnis yang berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat saat ini, seperti perkembangan teknologi, manajerial, social, kultur, dan politik. Bagi sebagian kalangan pelaku bisnis, bisnis merupakan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan (laba). Bisnis adalah bisnis dan tidak ada kaitannya dengan nilai moral (moralitas) (Rahardjo, 1995 dan George, 1986 dalam Fauroni, 2003).

Problema etika dalam bisnis beragam sifatnya, meliputi kepentingan dan keuntungan pribadi yang berlawanan dengan kepentingan orang lain (*egoistis*), tekanan persaingan dalam meraih laba yang melahirkan konflik persaingan (kekerdilan mentalitas), otoriter dan etnosentris (Affif, 2003). Praktik bisnis yang kurang *fair* yang marak di masyarakat adalah budaya suap yang dapat menumbuhkan krisis moral termasuk didalamnya krisis etika dan kepedulian sosial. Jika dalam dunia bisnis, semua pihak yang terlibat didalamnya seperti investor, pelanggan, rekan kerja, kreditor dan manajer tidak jujur, tidak adil, semua transaksi bisnis tidak akan dapat menyajikan informasi yang memiliki kredibilitas dan akan terdapat pihak-pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Untuk itulah diperlukan suatu aturan sebagai batasan (etika) dalam berbisnis.

Menurut Lawrence dan Weber, 2011, Etika bisnis merupakan pengaplikasian gagasan etis secara umum pada perilaku bisnis. Etika dalam suatu bisnis merupakan salah satu penerapan tanggung jawab sosial suatu usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha itu sendiri. Yangmana dalam kegiatan usahanya, suatu bisnis akan dihadapkan pada masalah-masalah etis yang berhubungan dengan beberapa pihak seperti : karyawan, investor, rekan bisnis, antar perusahaan lain, pelanggan, konsumen, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan bisnis.

Penerapan konsep etika tersebut dalam lingkup bisnis, dapat digambarkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Etika Bisnis

Dalam pandangan islam, visi masa depan merupakan etika pertama dan utama dalam melakukan usaha, sehingga pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan tetapi berorientasi ke depan (akhirat), sebagaimana Allah berfirman, *“Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki, dan Kami tentukan baginya neraka jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang yang usahanya akan disyukuri (dibalas) dengan baik”* (Al-Isra’ (17): 18-19) (Shihab, 2002). Berdasarkan ayat tersebut, ditekankan bahwa segala bentuk usaha berhubungan dengan Allah SWT, sehingga orientasi usaha haruslah dapat memberikan keuntungan yang bisa membawa pelaku usahanya pada keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan demikian, aktivitas usaha (bisnis) harus berdasarkan pada prinsip dasar yang islami.

Penerapan prinsip-prinsip dasar nilai etika dan aturan islam berkaitan dengan bisnis tertuang dalam Al-Qur’an, sebagaimana Allah berfirman, *“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, tetapi (hendaklah) dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* (An-Nisa (4): 9), dan dalam Hadits Bukhari : 2079, 2082, 2108, 2110, dan 2114, Nabi SAW bersabda *“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan aib dan berdusta, keberkahan dalam jual beli mereka akan hilang.* Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut, ditekankan bahwa suatu bisnis tidak boleh dijalankan secara *batil* (makna batil : bohong, sia-sia, tidak berguna, palsu) dan harus disepakati berdasarkan keridhaan (tidak ada yang dirugikan) bagi semua pihak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad, 2000, Mirakhor, 2000, Warde, 2000 dalam Tapanjeh, 2007, bahwa ciri-ciri utama dalam ekonomi islam adalah menjalankan prinsip-prinsip dasar seperti memberi (*to give just*), jujur (*honest*), adil (*fair*) dan adanya keseimbangan dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai etika dan aturan islam. Dengan demikian, semua pihak yang terkait dalam suatu transaksi bisnis, tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia tetapi

melibatkan juga Allah SWT dan alam semesta. Karena keberhasilan suatu bisnis tidak terlepas dari ijin Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman *“Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah setelah berusaha niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”* (Al-Thalaq (65):2-3)

Etika Dalam Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan bangunan sosial, sistem, sarana yang dipergunakan bersama dalam suatu kelompok dan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktifitasnya haruslah memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Etika melibatkan kewajiban manusia dan prinsip-prinsip yang melandasi kewajiban tersebut (Thompson dan Strickland, 2002). Kewajiban etis ditujukan kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi seperti investor, karyawan, pelanggan, rekan kerja dan masyarakat luas lainnya. Etika bisnis dalam organisasi perusahaan merupakan faktor penting untuk memastikan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan berdasarkan pada standar etika dan memiliki integritas yang tinggi. Sehingga dengan etika yang baik dalam berbisnis dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurut pandangan islam, suatu organisasi harus dapat menjaga keseimbangan antara individu, masyarakat dan alam semesta, Allah berfirman, *“Katakanlah, Sesungguhnya shallatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamanya berserah diri (kepada Allah)”* (Al-An’am (6):162-163). Dasar pengelolaan organisasi harus memiliki nilai atau etika berdasarkan prinsip islam. Karakteristik manajemen dalam islam yang membedakannya dengan manajemen modern adalah menjadikan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha sebagai faktor penting dalam aktivitas manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain nilai spiritual, nilai kemanusiaan, etika sosial, perilaku, ekonomi masyarakat, pengembangan sistem, dan motivasi secara material.

Masalah-masalah etika yang sering muncul dalam organisasi suatu perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Etika individu, berkaitan dengan moralitas pribadi, kepentingan pribadi, dan hubungan antar individu (pertemanan).
2. Etika korporasi, berkaitan dengan kepentingan perusahaan, kepentingan manajemen atau setiap bagian organisasi, standar peraturan, standar operasional dan prosedur perusahaan
3. Etika sosial masyarakat, berkaitan dengan ekonomi, tanggung jawab sosial, hukum dan standar professional.

Isu-isu yang berkaitan dengan etika berbeda-beda pada setiap organisasi perusahaan, dikarenakan setiap entitas bisnis memiliki karakteristik bisnis berbeda dan budaya kerja sendiri. *“Every business, in fact every organization, has a culture....(and it) has powerful to influence throughout an organization; it affects practically everything from who gets promoted and what decisions are made, to how employees dress..... when (new employees) choose a company, they often choose way of life.... “* (Deal dan Kennedy, 1982).

Budaya dalam suatu organisasi dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian dari keyakinan, nilai, norma, bahasa, kebiasaan yang dimiliki bersama oleh individu atau kelompok

yang dijalankan dalam suatu organisasi. Budaya dari suatu korporasi dapat mencerminkan norma, perilaku, aturan dan praktik bisnis yang berlaku dalam korporasi tersebut. Nilai-nilai utama yang berkaitan dengan budaya kerja dalam suatu organisasi dapat digunakan sebagai landasan dalam bekerja. Nilai-nilai utama yang dilaksanakan bersama dapat mewujudkan visi organisasi dalam beretika. Menurut Collins dan Poras, 1997 dalam Rampesad, 2006, nilai-nilai utama tersebut berkaitan dengan cara kita memperlakukan satu sama lain, seperti perlakuan terhadap pelanggan, karyawan, pemasok dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai, norma dan aturan syariah, sehingga mampu mengelola aset-aset masyarakat dan menjaga hak-hak masyarakat dengan seimbang dan berdasarkan prinsip keadilan. Pengelolaan yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan haruslah mengembangkan suatu budaya yang memiliki konsep "Amanah", karena segala yang seluruh yang ada di langit dan bumi merupakan milik Allah SWT, Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Seseungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Melihat"* (An-Nisa (4):58).

Selanjutnya, dari seluruh kegiatannya usahanya tersebut, setiap individu yang terkait dalam organisasi dalam menjalankan fungsinya, memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT selain kepada sesama manusia. Sehingga dalam menjalankan usahanya, para pelaku bisnis harus bersungguh-sungguh dan beretika, *"Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang berada diantara keduanya untuk main-main. Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu (permainan) yang melengahkan, melalaikan, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika kami hendak berbuat demikian tentulah kami telah melakukannya"* (Al-Anbiya' (21):16-17).

Dengan demikian, korporasi haruslah memiliki budaya korporasi dengan nilai utama berdasarkan prinsip islam dalam menjalankan aktifitasnya. Menurut Shihab, 2002, Nilai utama yang berkaitan dengan budaya kerja meliputi kerja adalah keniscayaan, kerja adalah ibadah, amal shaleh, kerja apik, penghargaan pada waktu, kerjasama dan optimisme. Sehingga diharapkan dengan nilai-nilai utama tersebut dapat membangun komitmen, kesetiaan, dan pengabdian dalam seluruh aspek organisasi baik untuk tujuan dunia maupun akhirat.

Etika Pada Bank Syariah

Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber air, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia maka syariah merupakan suatu aturan perilaku, sikap dan etika kerja berdasarkan Al Qur'an dan Hadits yang menjadi pedoman kehidupan muslim. Al Qur'an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dan Hadits merupakan catatan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Syariah mencakup aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (Ibadah) dan dengan sesama manusia (Mu amalah). Dalam aktivitas perekonomian, prinsip syariah menjadi dasar dalam menentukan aturan perdagangan, sistem keuangan termasuk didalamnya sistem perbankan.

Menurut Iqbal dan Mirakhor, 2008 prinsip-prinsip utama dalam sistem ekonomi islam meliputi:

1. Hak Milik
2. Kewajiban kepemilikan
3. Kontrak
4. Amanah

5. Kewajiban individual, Hak dan Kepentingan Diri
6. Kerja
7. Kekayaan
8. Konsep Berkah
9. Pembagian Risiko
10. Kompetisi dan Kerjasama

Semua perilaku masyarakat slam dalam aktivitas usahanya harus berdasarkan prinsip keadilan ekonomi, yaitu : Semua manusia memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, semua lapisan masyarakat memiliki keadilan dalam bertransaksi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Dalam sistem perbankan, bank syariah menurut islam harus memiliki aturan secara islami dalam keseluruhan kegiatan usahanya dimulai dari tata cara kerja seluruh staf karyawannya hingga praktik-praktik bisnisnya (budaya korporasi) yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dan bertanggung jawab menangani penggunaan modal dari masyarakat tidak hanya kepada masyarakat tetapi yang terutama mendapat ridha Allah SWT.

Berkaitan dengan budaya korporasi, yang membedakannya dengan bank konvensional adalah nilai islam yang harus diterapkan dalam semua tata kerja karyawan mulai dari masalah pakaian islami, pelayanan secara islami (*brand image islami*), hubungan internal di bank (antar karyawan, manajemen), hubungan dengan para nasabah, hubungan dengan rekan bisnis, hubungan dengan bank lain (syariah maupun konvensional). Sehingga dalam bank berdasarkan prinsip syariah, harus menetapkan sistem operasional, prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan nilai islam dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (fungsi sosial). Dengan etika berdasarkan nilai-nilai agama (islam), sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat menjadi bagian integral dari sistem keuangan islam yang mengedepankan keadilan ekonomi dunia dan akhirat.

Dalam menjalankan praktik bisnisnya, bank syariah memiliki beberapa prinsip-prinsip hukum yang mendasari transaksi-transaksinya (di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 13). Prinsip-prinsip hukum tersebut mendasari dari transaksi-transaksi utama dalam bank syariah yaitu jual beli, pemindahan kepemilikan, penyertaan modal, pemindahan hak untuk menggunakan barang dengan mendapatkan uang atau sewa, pinjaman, pemindahan property tanpa syarat. Berdasarkan karakteristik yang berbeda dengan system konvensional, maka dibutuhkan peraturan yang berbeda yang diterapkan dalam bank syariah. Menurut Chapra dan Khan, 2000, beberapa alasan untuk membuat peraturan dalam lembaga keuangan islam yang bercirikan khusus yaitu :

1. Karakteristik intermediasi keuangan islam
2. Timbulnya *pseudo-equity holder* (Depositor versus Investor)
3. Risiko sistematis
4. Lembaga keuangan islam yang merupakan bagian integral dari lembaga keuangan secara internasional

Meskipun hakekat bank syariah berbeda dengan bank konvensional, tetapi setiap transaksi-transaksi yang terjadi dalam bank syariah tidak menutup kemungkinan terdapat transaksi yang mengandung elemen-elemen yang melanggar etika seperti manipulasi, pelanggaran kepercayaan, yang dibuat-buat (*subterfuge*), pengelakan peraturan, yangmana semua elemen non etika tersebut dapat diterapkan ke dalam produk bank syariah. Sehingga transaksi-transaksi dalam bank syariah menjadi transaksi yang melanggar etika keislaman.

Permasalahan etika yang terjadi dalam dunia perbankan baik konvensional maupun syariah, masih banyak terdapat pelanggaran bahkan hingga masuk ke hukum pidana. Beberapa masalah pelanggaran pada Bank Umum atau BPR (konvensional) besar di Indonesia yang dapat merugikan neraca hingga mencapai trilyunan, diakibatkan oleh pelanggaran internal bank itu sendiri (karyawan maupun manajemen). Berdasarkan Bank Indonesia, 2012, pelanggaran tersebut meliputi penyimpangan prosedur, masalah manipulasi laporan, pemalsuan dokumen, pembobolan dana nasabah oleh karyawan, pengiriman berita palsu, pemberian kredit dengan identitas palsu, jaminan fiktif, penggelapan uang kas bank, tindak penipuan terorganisasi (keseluruhan internal bank), dan lain-lain.

Pelanggaran atas etika yang terjadi di bank syariah, diakibatkan oleh pelanggaran secara hukum maupun secara syariah. Pelanggaran yang terjadi pada salah satu bank umum syariah di Indonesia, adalah pelanggaran dalam fasilitas pembiayaan murabahah yang melibatkan dua perusahaan besar, dengan nilai pembiayaan 226 milyar. Pelanggaran etika yang terjadi adalah masalah kepemilikan dari objek pembiayaan yang terkena dakwaan tindak pidana korupsi (Effendy, 2012). Dari hasil penelitian Azhar Rosly dan Abu Bakar, 2003, beberapa pelanggaran etika terjadi dalam praktik bisnis bank syariah di Malaysia, meliputi munculnya riba pada penerapan akad pinjaman (qardh), Pembiayaan Al-Murabahah dan Ijara wa iqtina yang tidak memperhitungkan risiko tetapi menambahkan nilai kontrak (untung (*al ghunmu*)) muncul tanpa adanya risiko (*al-ghurmi*)), transaksi pada jual beli (*al Bai'*) menjadi suatu legalisasi dari riba. Menurut Diwany, 2008, produk pembiayaan yang diaplikasikan pada bank dengan prinsip syariah di London masih terdapat produk yang mengandung unsur riba seperti parallel 'istishna, ijara dengan tiga atau lima kontrak.

Berdasarkan masalah-masalah etika tersebut, khususnya dalam dunia bisnis perbankan, baik secara konvensional maupun prinsip syariah, menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran etika di Indonesia maupun di negara lain yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan baik oleh karyawan secara individu atau oleh lembaga secara keseluruhan. Kondisi demikian menunjukkan masih lemahnya sistem tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam sektor perbankan masih membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk membangun kualitas kelembagaan dan penerapan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh. Kualitas kelembagaan yang baik tidak lepas dari penerapan etika yang baik (*Good Ethic*) secara individu maupun korporasi dari lembaga itu sendiri. Dan dibutuhkan suatu patokan dengan proses perbaikan berkesinambungan atas pengembangan *Good Corporate Governance*, yang bisa menghantarkan pelayanan yang baik (*Good services*) kepada Allah SWT dan masyarakat dalam setiap masa.

Patokan (BENCHMARKING)

Membangun kualitas kelembagaan dengan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh harus menekankan pada komitmen dari manajemen khususnya dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjaga kinerja yang terbaik. Sehingga dibutuhkan suatu standar yang dapat menunjang pengembangan kualitas kelembagaan. Menurut Heizer dan Render, 2004, *Benchmarking* (patokan) merupakan salah satu program dalam membangun kualitas organisasi keseluruhan, dengan melakukan pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas.

Proses dari *benchmarking* merupakan suatu proses secara sistematis dalam mencari hingga menetapkan standar kinerja yang memiliki nilai *innovative* dengan prosedur operasi

yang sangat efektif yang dapat mengarahkan suatu organisasi atau lembaga untuk memiliki kinerja dan kualitas yang terbaik. *Benchmarking* ditujukan untuk dapat diterapkan pada tingkat individu, tingkat manajemen, korporasi atau lembaga dan umum. Dasar pengenaan patokan (*benchmarking*) meliputi produk standar, jasa, biaya atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari aktivitas yang serupa (Heizer dan Render, 2004).

Proses dari *benchmarking* membutuhkan komitmen dan keterlibatan secara aktif manajemen khususnya manajemen puncak, setiap individu dalam organisasi, dalam hal perubahan ke arah yang lebih baik, keterbukaan terhadap ide-ide dan perbaikan berkesinambungan. Isu-isu pelanggaran etika yang telah terjadi, dapat dijadikan salah satu bahan acuan (*benchmarking*) dalam memperbaiki kelemahan sistem yang ada khususnya sistem pengawasan (control dan monitoring) dan meningkatkan perbaikan etika dalam lingkungan organisasi. Budaya organisasi dapat dijadikan salah satu cara organisasi dalam memecahkan masalah-masalah pelanggaran etika. Pengembangan budaya kerja dalam suatu organisasi dapat meliputi sifat manusia dalam kegiatannya, perilaku sehari-hari, mendefinisikan benar dan salah, hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia, hubungan organisasi dengan lingkungan, masalah keanekaragaman, dan lainnya.

Dengan model budaya kerja yang baik, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam organisasi. Pada sisi lain, yaitu korporasi, harus memperhatikan model perilaku manajemen yang dapat menciptakan permasalahan etika dan kinerja yang kurang baik yang terjadi dalam organisasi. Menurut Gilbert, 1987, model perilaku tersebut antara lain: Tidak menyediakan insentif yang baik untuk kinerja yang baik, mengabaikan kapasitas perorangan, mengabaikan motivasi perorangan, memberi orang sedikit panduan atau tidak samasekali tentang cara berkinerja dengan baik, tidak membiarkan karyawan mengetahui seberapa baik kinerja mereka, tidak melibatkan orang-orang dalam pemilihan instrumen kerja, tidak membantu orang memperbaiki keterampilan mereka.

Dalam islam, banyak prinsip-prinsip dasar yang baik yang tidak hanya ditujukan bagi manusia itu sendiri tetapi dalam segala hal aktivitas manusia dari mulai hal terkecil hingga secara seluruh alam semesta, dengan mengedepankan keseimbangan dunia dan akhirat. Keseluruhan prinsip tersebut merupakan patokan (*benchmarking*) yang terbaik jika dapat diterapkan oleh manusia sebagai individu dalam aktivitas apapun, termasuk di dalamnya pengembangan kualitas kelembagaan secara menyeluruh. Karena semua aturan yang mengatur perilaku manusia dan alam semesta, semua langsung dibuat oleh Allah SWT.

Peraturan tersebut memiliki pengukuran yang dapat dipastikan kebenarannya dan berlaku adil. Allah SWT membuat peraturan berdasarkan pada kasih sayang bagi seluruh alam semesta (*Rahmatan lil 'Alamin*) dan tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya, walaupun manusia itu tempatnya khilaf dan kesalahan. Sebagaimana firman Allah SWT, “*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tiada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*” (AR-Rum (30):30). “*Allah tidak mengampuni siapa yang mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, dan dapat mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki*” (An-Nisa (4):48).

TATA KELOLA (CORPORATE GOVERNANCE)

Tata kelola usaha (*Corporate Governance*) merupakan struktur, proses, budaya dan sistem untuk menciptakan keberhasilan kondisi operasional suatu organisasi (Keasey, Thompson, dan

Wright, 1993). *Corporate Governance* berisikan tentang pengaturan dan hubungan antar organisasi atau lembaga yang dapat mengarahkan dan mengendalikan suatu korporasi atau organisasi perusahaan. *Corporate Governance* berkaitan dengan tugas pemegang kuasa untuk memastikan kebiasaan yang baik dalam perusahaan dan melakukan perlindungan atas nilai pemegang saham, dan *Good Corporate Governance* (GCG) terjadi pada saat terjadinya kondisi proses dan kebiasaan yang baik telah berjalan (Tjahjono, Untung, Hardjanti, 2013).

Jika dalam suatu organisasi perusahaan, etika dijadikan suatu pedoman dalam budaya organisasi, maka seluruh individu dari organisasi dapat membangun budaya yang menjunjung etika (terciptanya suatu integritas). Beberapa manfaat atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang akan diperoleh suatu organisasi atau korporasi dapat dijelaskan dalam gambar 1.2 berikut,



Gambar 1.2 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Sebuah organisasi menurut pandangan islam harus berdasarkan pada beberapa konsep, yaitu organisasi harus melayani Allah SWT, merancang instrumen dan keuangan syariah, konsep amanah, dan konsep segala harta milik Allah SWT. Sehingga *Corporate Governance* dalam bank syariah berbeda dengan *Corporate Governance* bank konvensional, yaitu bank syariah harus mematuhi hukum islam dengan memberikan modal berdasarkan skema *Profit and Loss Sharing* atau pembiayaan yang halal (Lewis dan Algaoud, 2007). Menurut Tapanjeh, 2009, *Corporate Governance* menurut pandangan islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat diklasifikasikan pada table 1.1 berikut,

Tabel 1.1 CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM

NO	ISLAMIC PRINCIPLES	ELEMENTS
I	Insuring the basis for an effective corporate governance framework	1. Promotion of business within ethical framework of shariah 2. Believes in profit and loss 3. Primacy of justice and social welfare with social and spiritual obligations 4. Prohibition of interest

II	The rights of shareholders and key ownership functions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Property as trust from God 2. Sole authority is God 3. Society as stakeholder 4. Accountability not only to stakeholders but also to God, the ultimate owner
III	The equitable treatment of shareholders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Just and fairness of value 2. Equitable distribution of wealth to all stakeholders and disadvantages members in the form of zakah and sadqa 3. Social and individual welfare with both spiritual and moral obligation 4. Sensation of equality
IV	The role of stakeholders in corporate governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Islamic accountability to falah and social welfare orientation 2. Haram/halal dichotomy in transaction 3. Social and individu welfare from both spiritual and material 4. Consideration to whole community
V	Disclosure and transparency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accountability with syariah compliance 2. Socio-economic objectives related to firms' control and accountability to all its stakeholders 3. Wilder accountability with written as well as oral disclosure
VI	The Responsibilities of the board	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accountability not only to company or board or stakeholders but also Allah the ultimate authority who leads to welfare and success 2. Holistic and integrative guidance 3. Negotiation and co-operation 4. Consultation and consensus seeking for each decision with related stakeholders

Sumber : A.M Abu Tapanjeh - Critical Perspective on Accounting 20 (2009) 556-567

Faktor-faktor penting dalam *corporate governance* bank syariah adalah proses regulasi baik internal maupun eksternal, sistem pengendalian dan pengawasan ternal. Komponen penting yang dapat menunjang jalannya *corporate governance* bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah, karena dalam kegiatan usaha bank syariah harus sesuai dengan hukum islam. Sehingga dapat diyakini bahwa semua produk dan pelayanan yang ditawarkan bank syariah dapat dijamin telah sesuai dengan prinsip syariah

METODOLOGI

Pembahasan permasalahan menggunakan kajian literatur, yaitu memilih teori-teori hasil penelitian, mengidentifikasi literature dan menganalisis konsep-konsep dan masalah-masalah yang berkaitan dengan etik khususnya berdasarkan pandangan islam yang dapat dijadikan patokan (*benchmarking*) dalam tata kelola usaha (*good corporate governance*) di bank syariah. Selain itu, digunakan pendekatan analisis berdasarkan penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk mendukung konsep-konsep berdasarkan nilai keislaman.

Ruang lingkup kajian meliputi pengidentifikasian, penjelasan dan penguraian secara sistematis dokumen-dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian (Subana dan Sudrajat, 2005). Dari hasil kajian tersebut akan diharapkan dapat membuat suatu kerangka pemikiran yang lebih logis berkaitan dengan permasalahan dalam bahasan penelitian.

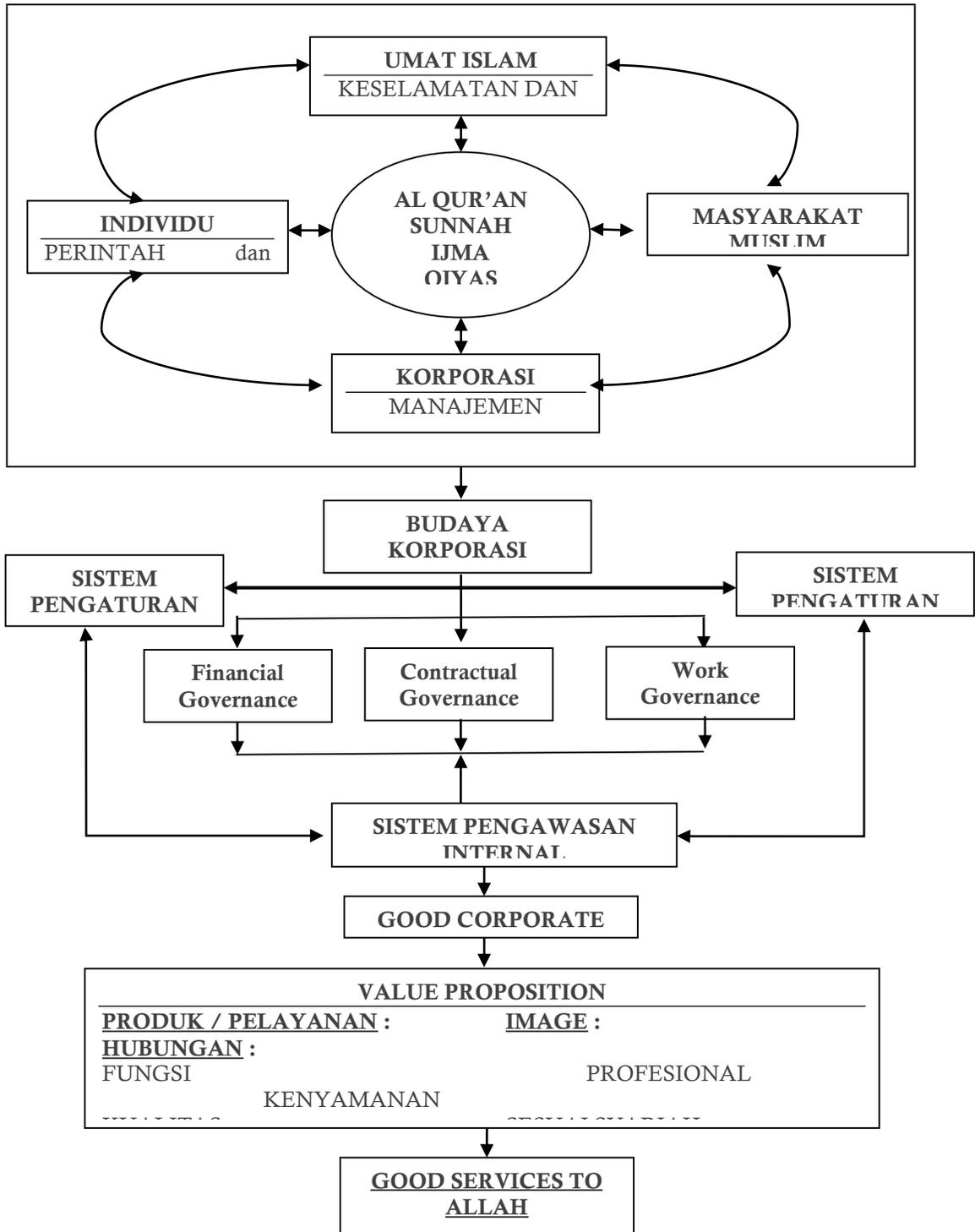
PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa kajian dari hasil penelitian yang berkaitan dengan etika, etika bisnis khususnya dalam dunia perbankan, masih terdapat banyak pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan bersangkutan, masyarakat bahkan negara. Hal tersebut menunjukkan masih banyak perusahaan khususnya perbankan yang masih mengesampingkan nilai etika sebagai tingkat tertinggi untuk pedoman kegiatan usahanya.

Pelanggaran etika tersebut disebabkan oleh niat dan akhlak individu, bahkan ada lembaga yang seluruh perangkat di dalam organisasi berkerja sama melakukan pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan untuk mengejar keuntungan pribadi (uang). Menurut beberapa ahli keuangan dan perbankan, dalam bank syariah masih terdapat pelanggaran etika yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan, yaitu adanya penyalahan prinsip syariah dalam produk yang dibuat. Pelanggaran tersebut mengindikasikan adanya rekayasa produk yang menjadikan produk tersebut seolah-olah sesuai syariah padahal masih mengandung unsur-unsur yang haram (disamarkan).

Kondisi demikian, khususnya di bank syariah, dapat mengindikasikan bahwa bank syariah memberikan informasi yang mengandung ketidakpastian jaminan halal atas kegiatan usahanya. Hal tersebut dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang berpegang teguh pada hukum islam.

Pelaksanaan tata kelola usaha bank syariah, membutuhkan komitmen dari seluruh elemen organisasi untuk menempatkan etika yang berdasarkan syariah (*benchmark*) dalam budaya korporasi mereka. Sehingga dapat membangun kualitas kelembagaan dengan standar etika yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dapat digambarkan pada gambar 1.3 berikut,



Gambar 1.3 Etika Islami sebagai *Benchmarking* Dalam *Corporate Governance*

KESIMPULAN

Setiap individu yang memiliki keyakinan agama islam, memiliki prinsip-prinsip islam dalam kehidupannya dengan aturan perintah dan larangan dari Allah SWT. Sehingga dalam setiap individu mengetahui bahwa jika melakukan sesuatu dengan benar dan baik maka akan mendapat pahala dari Allah SWT dan sebaliknya jika terjadi larangan maka akan mendapat siksa.

Dan setiap individu muslim memiliki hak dan kewajiban didalam menjalankan aktivitas usaha, sehingga akan tercipta keseimbangan secara materi dan spriritual. Prinsip-prinsip dalam islam mengatur setiap hubungan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga akan tercipta kesejahteraan seluruh manusia yang adil. Jika diaplikasikan dengan baik, tidak akan tercipta kesenjangan yang dapat mendorong individu melakukan pelanggaran karena tercipta ketidakadilan atau kesenjangan.

Berkaitan dengan tata kelola usaha, dalam prinsip islam selalu mengedepankan kualitas dan memberikan yang terbaik dalam kinerja usaha setiap muslim karena berpegang pada konsep amanah, yaitu tanggung jawab dunia dan akhirat. Tetapi karena fitrah manusia adalah tempat kesalahan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran. Dalam hukum islam pun mengatur tentang perbaikan yang terus menerus jika terjadi suatu pelanggaran kea rah yang perubahan yang lebih baik.

Aturan moral islam sedemikian sempurna, seharusnya dapat dapat mencegah perilaku tidak etis (*Early warning*) baik yang berkaitan dengan individu maupun usaha. Dalam tata kelola usaha (*Corporate Governance*), ajaran islam dapat menjadi suatu mekanisme yang dapat mengurangi informasi asimetris, meminimalisir tingkat risiko pelanggaran etika, dan meminimalisir inefisiensi dalam usaha, yang dapat menciptakan nilai perusahaan terbaik dunia dan akhirat. Etika berdasarkan prinsip-prinsip islam sangat tepat untuk dijadikan patokan (*Benchmarking*) dalam tata kelola usaha khususnya bagi semua kegiatan bisnis yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Afiff, Faisal. 2003. *Melacak Pemikiran Strategik: Pemecahan Masalah Di Indonesia*. Jakarta, Paramadina

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2011. *Ensiklopedia hadits: Shahih al-Bukhari cetakan kesatu*. Jakarta, Almahira

Bank Indonesia. 2012. *Sosialisasi SE Ekstern No. 14/26/DKBU: Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR*. Bandung: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV

- Badudu, Prof. Drs. J. S dan Prof. Sutan Muhammad Zain. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Chapra, Umer, and Tariqullah Khan. 2000. Regulation and Supervision of Islamic Bank. *Occasional Paper No. 3. Islamic research and Training Institute: Islamic Development Bank, Jeddah Saudi Arabia*
- Deal, Terrence E., and Allan A. Kennedy. 1982. *Corporate Culture: The Risks and Rituals of Corporate Life*. MA Addison Wesley, Pp 4, 16
- Diwany, Tarek el. 2008. *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*. Jakarta, PPM Manajemen
- Effendi SH., Prof. Dr. Marwan. 2012. *TIPOLOGI: Kejahatan Perbankan Dan Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta, Sumber Ilmu Jaya
- Fauroni, Lukman. 2003. Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Economics*, ISSN. 1411-013X, 91-106
- Gilbert, T.F. 1987. *Human Competence: Engineering Worthy Performance*. New York: Mc Graw Hill
- Heizer, Jay, and Barry Render. 2004. *Operations Management 7th*. USA, Prentice Hall
- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta, Kencana
- Keasey, Kevin, Steve Tompson dan Mike Wright. 1993. *Introduction: The Corporate Governance Problem-Competing Diagnoses And Solutions*.
- Lawrence, Anne T., and James Weber. 2011. *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy 13th*. New York: Mc. Graw Hill
- Lewis, Mervyn K., dan Latifa N. Algoud. 2001. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta, Serambi
- Naqvy, Syed Nawas. 1993. *Ethical and Economics: An Islamic Syntesis*. Bandung, Mizan
- Rosly, Saiful Azhar, Mohd Afandi Abu Bakar. 2003. Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International journal of Social Economics Vol. 30 No.12 pp 1249-1265*
- Rampersad, Dr. Hubert K. Rampesad. 2006. *Total Performance Scorecard*. Jakarta
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung, Mizan

Tapanjeh, Abdusalam Mahmoud Abu. 2007. Corporate Governance From The Islamic Perspectives: A Comparative Analysis With OECD, Principles. *Critical Perspective or Accounting Journal 20* (2009) 556-567. www.elsevier.com/locate/cpa

Thompson, A.A, and A.J Strickland. 2002. *Strategic Management: Concepts and Cases*. Boston, Mc. Graw Hill

Tjahjono, Subagio, Dr. H. Budi Untung dan Yohana Hardjanti. 2013. *Business Crime and Ethics*. Yogyakarta, Andi